

Abdullah Rasyid: Kedaulatan Karbon dan Jalan Indonesia Menjadi Green Superpower

Updates. - KORLANTAS.ID

Jul 12, 2026 - 12:36



OPINI - Pada abad ke-20, kekuatan negara banyak ditentukan oleh penguasaan minyak, gas, mineral, jalur perdagangan, dan teknologi industri. Memasuki abad ke-21, peta kekuatan itu mulai berubah. Ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah emisi, karbon tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persoalan lingkungan. Ia telah menjadi aset ekonomi, instrumen pembiayaan, sumber daya strategis, dan bahasa baru diplomasi global.

Perubahan itu bukan sekadar wacana. Bank Dunia mencatat bahwa pada 2026 terdapat 87 kebijakan penetapan harga karbon di berbagai negara. Lebih dari 29 persen emisi gas rumah kaca global telah tercakup dalam instrumen harga karbon. Pendapatan yang masuk ke anggaran publik dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi bahkan melampaui 107 miliar dollar AS pada 2025. Rata-rata harga karbon dunia mendekati 21 dollar AS per ton karbon dioksida ekuivalen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon telah memasuki pusat kebijakan ekonomi dunia.

Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat di Bandung menjadi relevan. Menurut Jumhur, kekuatan bangsa pada masa depan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan sumber daya alam, tetapi dari kemampuan mengelolanya secara berkelanjutan. Ia menempatkan solusi berbasis alam dan pasar karbon berintegritas sebagai bagian dari jalan Indonesia menjadi green superpower.

Kata kuncinya bukan lagi cadangan, melainkan kapabilitas.

Modal Besar, Pasar Masih Kecil

Indonesia memiliki modal ekologis yang sulit ditandingi. Luas tutupan hutan Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektare. Indonesia juga memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau kurang lebih 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi penting dalam pengendalian perubahan iklim global.

Namun, luasnya aset ekologis belum otomatis mencerminkan besarnya kekuatan ekonomi karbon.

Hingga 30 Juni 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat volume perdagangan kumulatif sekitar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen, dengan nilai transaksi Rp93,81 miliar dan 155 pengguna jasa.

Apabila nilai transaksi tersebut dihitung secara agregat, rata-ratanya hanya sekitar Rp47.500 per ton karbon dioksida ekuivalen. Angka itu memang tidak dapat diperlakukan sebagai harga acuan karena transaksi karbon terdiri atas beragam jenis unit dan mekanisme. Namun, ia tetap memberi gambaran bahwa kedalaman serta nilai ekonomi pasar karbon domestik masih relatif terbatas dibandingkan besarnya aset ekologis Indonesia.

Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.

Indonesia jangan mengulangi pola lama pengelolaan sumber daya alam: memiliki bahan mentah, tetapi menyerahkan teknologi, pembiayaan, standardisasi, pembentukan harga, pasar, dan nilai tambah kepada pihak lain.

Dalam ekonomi hijau, pola tersebut dapat muncul dalam bentuk baru. Indonesia menjaga hutan dan mangrove. Masyarakat memelihara ekosistem. Daerah menanggung biaya konservasi. Namun, metodologi, lembaga verifikasi,

pembiayaan, penilaian kualitas, dan harga karbon lebih banyak ditentukan oleh institusi di luar negeri.

Apabila itu terjadi, Indonesia mungkin menjadi pemasok kredit karbon besar, tetapi belum menjadi green superpower.

Dari Cadangan Menuju Kedaulatan

Karbon baru menjadi aset strategis apabila negara mampu menguasai seluruh rantai nilainya.

Indonesia harus mengetahui berapa besar potensi karbonnya, siapa pemegang haknya, bagaimana karbon diukur, siapa yang memverifikasi, dengan standar apa ia disertifikasi, di mana ia diperdagangkan, bagaimana harga terbentuk, serta ke mana manfaat ekonominya mengalir.

Tanpa penguasaan tersebut, Indonesia hanya menjadi pemilik cadangan, bukan pemilik nilai.

Kerangka kebijakan sebenarnya terus diperkuat. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, kerangka transparansi, registrasi, pemantauan, serta kelembagaan pengarah.

Indonesia juga telah membuka perdagangan karbon luar negeri. Pada saat peluncurannya pada Januari 2025, pemerintah mengotorisasi sekitar 1,78 juta ton karbon dioksida ekuivalen untuk perdagangan internasional. Sistem Registri Nasional, mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, serta mekanisme penyesuaian dalam perdagangan internasional menjadi bagian dari instrumen pengaman untuk mencegah penghitungan dan klaim ganda.

Langkah tersebut penting. Namun, pasar bukan tujuan akhir.

Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari kenaikan volume transaksi. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah harga karbon mencerminkan kualitas aset ekologis Indonesia, apakah nilai tambah tetap berada di dalam negeri, apakah institusi nasional menguasai teknologi pengukuran dan verifikasi, serta apakah daerah dan masyarakat penjaga ekosistem memperoleh manfaat yang layak.

Pasar yang besar belum tentu menghasilkan kedaulatan.

Integritas adalah Modal Utama

Dalam ekonomi karbon, aset paling mahal sesungguhnya bukan karbon, melainkan kepercayaan.

Satu unit karbon hanya bernilai apabila pengurangan atau penyerapan emisinya nyata, terukur, dapat diverifikasi, tidak dihitung dua kali, serta tidak merusak hak masyarakat. Karena itu, integritas bukan sekadar tuntutan moral. Integritas adalah fondasi ekonomi dan reputasi.

Indonesia telah menunjukkan bahwa aksi iklim yang dapat diukur mampu menghasilkan nilai ekonomi. Melalui skema pembayaran berbasis hasil REDD+, Indonesia memperoleh komitmen sekitar 499,8 juta dollar AS, dengan sekitar 340,7 juta dollar AS telah disalurkan. Capaian itu menunjukkan bahwa data yang kredibel, penurunan emisi yang terverifikasi, dan tata kelola yang dipercaya dapat mengubah perlindungan hutan menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Namun, kapasitas tersebut harus diperluas.

Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu karbon, lembaga verifikasi nasional yang kredibel, teknologi pemantauan yang mandiri, pembiayaan domestik, serta sistem data yang berada dalam kendali negara.

Second Nationally Determined Contribution Indonesia menggunakan emisi bersih 2019 sebesar sekitar 1,145 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sebagai tahun rujukan. Dokumen tersebut memproyeksikan puncak emisi nasional pada sekitar 2030 dan mempertahankan arah menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Artinya, kebijakan karbon bukan proyek sampingan kementerian lingkungan. Ia merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional.

Jangan Menjadi Koloni Karbon

Indonesia juga harus mewaspadaai risiko kolonialisme hijau.

Dalam skenario terburuk, negara berkembang hanya menjadi penyedia hutan, kawasan konservasi, dan kredit karbon bagi kebutuhan dekarbonisasi negara maju. Masyarakat lokal menjaga ekosistem dan menerima pembatasan terhadap ruang hidupnya, sedangkan nilai ekonomi terbesar dinikmati lembaga keuangan, konsultan, pengembang proyek, dan pembeli global.

Karena itu, hak atas karbon harus jelas. Data karbon harus berada dalam kendali sistem nasional. Kontrak jangka panjang harus melindungi kepentingan generasi mendatang. Manfaat ekonomi harus kembali kepada daerah dan masyarakat yang menjaga ekosistem.

Karbon bukan sekadar angka dalam sertifikat. Ia melekat pada hutan, tanah, pesisir, ruang hidup, dan masa depan pembangunan Indonesia.

Green superpower pada akhirnya bukan gelar yang diberikan oleh forum internasional. Ia dibuktikan melalui kemampuan negara menguasai data, menentukan standar, menjaga integritas, membangun pasar yang dalam, mempertahankan nilai tambah, dan mengubah kekayaan ekologis menjadi daya tawar ekonomi serta geopolitik.

Indonesia telah memiliki modal alamnya. Sekarang saatnya membangun kedaulatannya. Indonesia tidak boleh hanya dikenal sebagai negeri yang kaya karbon. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat atas karbon.

Jakarta, 12 Juli 2026

Abdullah Rasyid

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute